

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK 2017 DI KABUPATEN BREBES

(Studi Tentang Perilaku Pemilih di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)

TIM PENGUSUL :

Dra. Hj. SRI SUTJIATMI, M.Si / NIDN. 0027056301 (KETUA)

DIRYO SUPARTO, M.Si / NIDN. 0628077901 (ANGGOTA)

SARWO EDY, M.I.Kom (ANGGOTA)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam PILKADA Serentak 2017 di Kabupaten Brebes (Studi tentang Prilaku Pemilih di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)
2. Bidang Penelitian : Ilmu Politik
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si
 - b. NIDN : 0027056301
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala
 - d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 - e. Nomor HP : 08156523396
 - f. Alamat email : sutji_fisip@yahoo.co.id
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : 5
 - b. Nama Anggota :
 1. Diryo Suparto, S.Sos, M.Si
 2. Sarwo Edi, M.Ikom
 3. Reza (Mahasiswa)
 4. Daffa (Mahasiswa)
 5. Dewo (Mahasiswa)
5. Lokasi Penelitian : Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
7. Biaya : Rp. 9.230.000,- (sembilan juta dua ratus tigapuluh ribu)

Mengetahui,

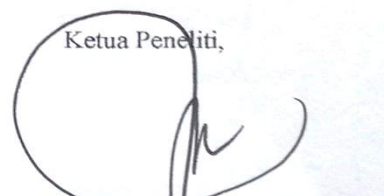
Wakil Dekan II



(Unggul Sugiharto, S.IP, M.Si)

NIPY. 14251921973

Ketua Peneliti,



(Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si)

NIP. 19630527198832001

Menyetujui,

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Dra. Ponoharjo, M.Pd)

NIP. 195903051985031005



PRAKATA

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat dan hidayah-Nya sehingga tim penelitian dapat menyelesaikan penelitian serta laporannya dengan judul “Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2017 Di Kabupaten Brebes (Studi Tentang Perilaku Pemilih di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes).

Pada kesempatan ini tim penulis menyampaikan terimakasih kepada LPPM Universitas Pancasakti Tegal, KPUD Kabupaten Brebes, serta masyarakat Kecamatan Songgom sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Tim penulis berusaha untuk menyempurnakan laporan ini, namun sebagai manusia biasa kami pun menyadari akan kekurangan kami. Oleh karena itu, kami sangat berharap saran dan kritik yang membangun untuk penelitian selanjutnya.

Tegal, Juli 2017

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	vi
Prakata	v
Daftar Isi	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. State of the Art	7
2.2. Partisipasi Politik Masyarakat	7
2.3. Perilaku Pemilih	10
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
3.1. Tujuan Penelitian	13
3.2. Manfaat Penelitian	13
BAB 4. METODE PENELITIAN	14
4.1. Tipe Penelitian	14
4.2. Teknik Pengumpulan Data	14
4.3. Populasi dan Sampel Penelitian	15

4.4. Analisis Data	16
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	17
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	21
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah prinsip bangsa atau negara ini dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi di Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD '45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua anggota masyarakat yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu.

Salah satu perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hal, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi, maupun kabupaten/kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Pasal 40 UU No. 32/2004).

Sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau "Pemilukada".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Khusus di Kabupaten Brebes, Pilkada Bupati Brebes 2017 dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Brebes periode 2017-2022, serta KPUD Brebes telah menetapkan dua pasang kandidat peserta Pilkada Brebes 2017. Pada 25 Oktober 2016, KPUD telah mengundi nomor urut peserta Pilkada Brebes.

Pasangan nomor urut 1 adalah pasangan DR.H. Suswono dan Ahmad Mustaqim yang diusung oleh PKS dan Gerindra. Pasangan ini mendaftar pada Jumat tanggal 23 September 2016, pukul, 16.00 WIB. Data perolehan kursi di DPRD Kabupaten Brebes yang dihimpun kabarberitaku.com, PKS dan Gerindra yang mengusung Suswono -

Musttaqin memiliki 11 kursi di DPRD Brebes dengan rincian enam kursi PKS dan lima kursi Gerindra.

Pasangan nomor urut 2 adalah pasangan Hj. Idza Priyanti dan Narjo yang diusung oleh Partai PDIP, dan enam pengusung lainnya yakni, Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Demokrat, PAN dan Partai Hanura. Pasangan ini mendaftar pada Rabu (21/9/2016). Partai pengusung Idza - Narjo memiliki 39 kursi dengan rincian PDI Perjuangan 11 kursi, PKB 8 kursi, Golkar 7 kursi, PAN 5 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 3 kursi dan Hanura 1 kursi.

Sementara itu, salah satu indikator majunya demokrasi di suatu wilayah adalah adanya pemilihan umum yang jujur dan adil dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan suaranya secara langsung pada pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif atau pemilihan presiden.

Pemilu atau Pilkada yang selama ini berlangsung di Kabupaten Brebes membawa catatan sendiri, terutama pada partisipasi pemilih yang berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU atau KPUD Brebes.

Partisipasi politik tersebut antara lain berbentuk penunaian hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum. Hal tersebut mencerminkan tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, dapat pula memberikan legalitas atas kondisi sosial politik dan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.902,37 km², jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa (2010). Ibukotanya ada di Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten

Cilacap. Penduduknya banyak bekerja disektor pertanian, kelautan dan perikanan, disamping itu banyak warga Brebes yang merantau.

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penyebab rendahnya partisipasi pemilih karena banyaknya warga setempat yang menjadi urban, para nelayan yang memilih melaut, apatisme warga terhadap pelaksanaan pemilu atau pilkada.

Sangat menarik bahwa data hasil perolehan suara disetiap agenda pemilu atau pilkada masyarakat Brebes khususnya di Kecamatan Songgom selalu rendah. Apakah kondisi rendahnya partisipasi pemilih di daerah tersebut akan terus berulang? Selain kesibukan mencari nafkah, adakah faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih tersebut. Masalah pokok inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Kabupaten Brebes dalam hal ini KPUD Brebes menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan kepada daerah atau Pilkada serentak 2017 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Februari 2017. Masyarakat Brebes yang berhak untuk memilih telah melakukan pencoblosan secara langsung pada masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), setelah itu dilakukan penghitungan surat suara secara manual pada siang harinya. Yang disaksikan langsung oleh para saksi dan panitia penyelenggara di tiap TPS, serta dari seluruh hasil penghitungan dikirim ke KPUD untuk dilaksanakan rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara. Hasil akhir dari semua inilah yang merupakan perolehan yang sah oleh KPUD dan akan menjadi penentu terhadap siapa pemenang pilkada di wilayahnya masing-masing.

Dari hasil hitung cepat/Quick Count pasangan petahana, Izha-Narjo mengungguli perolehan suara sebesar 67,9 persen, sedangkan pasangan

DR. H. Suswono – Ahmad Mustaqqim hanya meraih suara sebesar 32,09 persen.

Namun dari hasil itu semua, terdapat permasalahan yang sangat serius yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Brebes, tergolong rendah. Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten menunjukkan partisipasi pemilih hanya 55,4 persen. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Brebes mencapai 1.522.560 orang. Jika ditambah data jumlah pemilih tambahan, maka jumlah pemilih di Brebes mencapai 1.531.813. Pada Pilkada 15 Februari lalu, hanya ada 838.167, yang menyalurkan hak pilih. Artinya ada 693.646 atau sekitar 44 persen warga yang tidak mencoblos. Jumlah itu jauh di bawah target KPU yang mencapai 76 persen.

Berdasarkan data di KPU Kabupaten Brebes, rata-rata kehadiran pemilih tertinggi kecamatan ada di Kecamatan Salem yang mencapai 76,31 persen. Sedangkan untuk tingkat desa, kehadiran tertinggi ada di Desa Kadumanis, Kecamatan Salem yang mencapai 88,56 persen. Untuk rata-rata kehadiran terendah di Kecamatan Songgom yang hanya 58,46 persen. Dan desa dengan tingkat kehadiran paling rendah ada di Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes yang hanya 37,12 persen. Khusus untuk Pilkada 2017 ini, daerah paling rendah tingkat partisipasinya yaitu Kecamatan Songgom. Jumlah partisipasi pemilih di kecamatan tersebut hanya 31.793 dari total jumlah pemilih 69.705 atau 45,6 persen.

Menurut Ketua KPUD Brebes Muamar Riza Pahlevi, pihaknya telah melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu melakukan sosialisai dengan cara menggelar festival Rebana di Alun-alun Brebes, sosialisasi di Lapas, dan yang gencar dilakukan yaitu selain ke pelosok-pelosok daerah yang warganya merantau ke berbagai daerah di Indonesia, juga melalui medsos seperti Facebook, khususnya warga Brebes yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini dilakukan berdasarkan data

yang diketahui ada sekitar 40 ribu warga Brebes yang menjadi TKI diluar negeri yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah pendidikan dan jenis pekerjaan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana pemahaman / pengetahuan masyarakat tentang Pilkada ?
3. Apa penyebab masyarakat Kecamatan Songgom tidak berpartisipasi di Pilkada serentak 2107 ?
4. Bagaimana harapan masyarakat untuk Pilkada / Pemilu selanjutnya supaya sukses dan lancar ?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. State of the Art

Penelitian yang dilakukan oleh KPUD Brebes pada tahun 2015 dengan judul penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan unit analisis yaitu masyarakat kecamatan Salem, kecamatan Songgom dan kecamatan Brebes yang terdaftar di DPT KPUD Brebes. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 meningkat secara nasional, namun di daerah Kecamatan Songgom tingkat partisipasinya masih rendah.

2.2. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga dipahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan, sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Masyarakat merupakan bagian dalam partisipasi politik. Salah satu wujud nyata dari partisipasi politik masyarakat ialah pada saat pemilihan umum, dalam hal ini masyarakat memiliki peranan dalam pengambilan keputusan. Dalam pemilihan umum masyarakat memberikan hak pilihnya untuk menentukan siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta dalam partisipasi politik masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada saat pemilihan umum masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Hal ini dapat terjadi karena faktor tertentu.

Banyak faktor untuk menjelaskan pasang surut partisipasi pemilih tersebut. Dari perspektif kajian perilaku pemilih, gejala tersebut dapat dijelaskan dengan konsep utama perilaku memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih (non-voting behavior). Pendapat David Moon yang dikutip oleh Saleh (2007) menyatakan bahwa perilaku non-voting dapat ditelaah dengan dua pendekatan teoritik. Pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu. Kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.

Rendahnya partisipasi dalam pemilu, dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai perilaku non-voting yang secara teoretik disebabkan oleh banyak faktor. berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan berkonfirmasi di tingkat empirik, yaitu dengan anggota masyarakat pemilih di Kecamatan Songgom yang partisipasinya dalam agenda pemilu selalu rendah.

Adapun partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa (Huntington dan Nelson, 1990:9-10).

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi: (Huntington dan Nelson, 1990:9-10)

1. Kelas, yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau komunal, yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. Lingkungan, yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.

4. Partai, yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
5. Golongan atau faksi, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

Bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi: (Huntington dan Nelson, 1990:9-10)

1. Kegiatan Pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Dengan kata lain, bahwa secara umum partisipasi politik dapat dinyatakan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan orang-orang dalam kegiatan politik. Kegiatan politik itu beragam dalam bentuk dan substansinya. Salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.

2.3. Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konsestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konsestan yang bersangkutan. (Firmanzah, 2007:102)

Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstiuen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin. (Firmanzah, 2007:105)

Perilaku pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara. Pemberian suara dalam Pilkada secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukungnya atau ditujukan dengan perilaku masyarakat dalam memilih pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung-pen. Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”. (Surbakti, 1997:170)

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin

jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku pemilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu : (Asfar, 2006: 137-144)

1) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dsb) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua dan muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

2) Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi- terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-

variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang.

Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

3) Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya sebagai berikut :

- Mengetahui tinggi atau rendahnya partisipasi politik masyarakat di setiap Kecamatan se-Kabupaten Brebes dalam Pilkada serentak 2017.
- Mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes dalam Pilkada serentak 2017.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat kajian mengenai partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes dalam Pilkada serentak 2017 ini antara lain adalah :

- Kajian ini memberi kita gambaran tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes dalam Pilkada serentak 2017.
- Kajian ini juga dapat mengungkap faktor – faktor ataupun alasan – alasan apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes dalam Pilkada serentak 2017.
- Kajian ini memungkinkan munculnya inovasi langkah-langkah baru yang sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes dalam Pemilu yang akan datang.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data, fakta dan keadaan atau kecenderungan yang ada, dengan kata lain tidak untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu berusaha memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual melalui pengumpulan data, penyusunan data yang akhirnya dijelaskan dan dianalisis.

Pendekatan deskriptif dipilih karena dapat: (1) mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisis kondisi subjek di lokasi penelitian; (2) menggambarkan dan menafsirkan data yang telah diperoleh di lapangan baik berkaitan dengan antar-data maupun kecenderungan pengembangannya; dan (3) memecahkan permasalahan aktual melalui data yang telah dikumpulkan, disusun, dan dianalisis.

4.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara terus menerus dengan responden dalam berbagai situasi, meskipun kadangkala dilakukan pula dalam situasi yang khusus. Pelaksanaan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang memadai sehubungan dengan pokok masalah penelitian yang telah diidentifikasi.

2. Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) “Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.”

Selain menggunakan wawancara, pengumpulan data penelitian ini menggunakan pula studi dokumen, sebagai sumber data yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk melakukan pengecekan kesesuaian data. Pemilihan sumber data didasarkan pada kriteria sebagai berikut: keotentikan isi dokumen, isi dokumen dapat diterima sebagai suatu kenyataan; dan kecocokan atau kesesuaian data untuk menambah pengertian tentang masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah data dari KPUD Kabupaten Brebes.

3. Angket

Menurut Sugiyono (2008:199) “Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”.

Angket merupakan teknik sekaligus instrumen pengumpulan data yang memuat daftar pertanyaan terperinci dan lengkap serta berisi pertanyaan tentang fakta-fakta yang dianggap dikuasai oleh responden.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh adalah anggota masyarakat kecamatan Songgom yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPUD Brebes.

Untuk mengambil sampel digunakan prosedur pengambilan sampel secara bertahap. Tahap pertama menentukan TPS-TPS sebagai sampel wilayah, menggunakan prosedur random sampling. Tahap selanjutnya, dari masing-masing sampel wilayah tersebut ditentukan sampel orang sebagai responden masing-

masing berproporsi 2,5%. Sedangkan penunjukkan subyek sampel sebagai responden penelitian ditentukan secara acak berdasarkan undian.

4.4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui angket, dianalisis menggunakan teknik statistika deskriptif. Terhadap data kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi, dianalisis dengan pemaknaan deskriptif.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Berdasarkan data yang ada di KPUD Kabupaten Brebes, terdapat permasalahan yang sangat serius yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Brebes, tergolong rendah. Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten menunjukkan partisipasi pemilih hanya 55,4 persen. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Brebes mencapai 1.522.560 orang. Jika ditambah data jumlah pemilih tambahan, maka jumlah pemilih di Brebes mencapai 1.531.813. Pada Pilkada 15 Februari lalu, hanya ada 838.167, yang menyalurkan hak pilih. Artinya ada 693.646 atau sekitar 44 persen warga yang tidak mencoblos. Jumlah itu jauh di bawah target KPU yang mencapai 76 persen.

Rata-rata kehadiran pemilih tertinggi kecamatan ada di Kecamatan Salem yang mencapai 76,31 persen. Sedangkan untuk tingkat desa, kehadiran tertinggi ada di Desa Kadumanis, Kecamatan Salem yang mencapai 88,56 persen. Untuk rata-rata kehadiran terendah di Kecamatan Songgom yang hanya 58,46 persen. Dan desa dengan tingkat kehadiran paling rendah ada di Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes yang hanya 37,12 persen. Khusus untuk Pilkada 2017 ini, daerah paling rendah tingkat partisipasinya yaitu Kecamatan Songgom. Jumlah partisipasi pemilih di kecamatan tersebut hanya 31.793 dari total jumlah pemilih 69.705 atau 45,6 persen.

Dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan secara acak kepada warga Kecamatan Songgom sebanyak 70 responden dengan teknik wawancara, maka didapat temuan sebagai berikut.

Menjawab rumusan masalah pertama terkait pendidikan dan jenis pekerjaan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Brebes. Dari hasil jawaban kusioner, sebanyak 7 responden menjawab

tidak sekolah, 22 responden menjawab SD, 23 responden menjawab SMP, 13 responden menjawab SMA, 3 responden menjawab D3, dan 2 responden menjawab S1. Pertanyaan selanjutnya tentang pekerjaan, sebanyak 15 responden menjawab petani/buruh tani, 15 responden menjawab karyawan, 5 responden menjawab TKI/merantau, 2 responden menjawab guru, 3 responden menjawab perawat/dokter/bidan, 3 responden menjawab pensiunan, 7 responden menjawab wiraswasta, 5 responden pelajar/mahasiswa, 2 responden menjawab seniman, 13 responden menjawab ibu rumah tangga/tidak bekerja. Dari hasil data tersebut dan dikomparasikan dengan pertanyaan lainnya ternyata latar belakang pendidikan serta pekerjaan tidak mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes terutama dalam hal ini kecamatan Songgom.

Menjawab rumusan masalah kedua terkait pemahaman / pengetahuan masyarakat tentang Pilkada. Dari pertanyaan pengetahuan masyarakat bahwa tanggal 15 februari 2017 dilaksanakan Pilkada di Kabupaten Brebes, sebanyak 70 atau semua responden menjawab tahu. Ini artinya bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Brebes terutama dalam hal ini Kecamatan Songgom mengetahui tanggal pelaksanaan Pilkada yang telah ditentukan oleh KPUD Kabupaten Brebes. Hasil jawaban dari pertanyaan selanjutnya terkait pemahaman masyarakat tentang makna partisipasi politik, sebanyak 41 responden menjawab ya sedangkan sisanya sebanyak 29 responden menjawab tidak. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Berikutnya hasil jawaban dari pertanyaan terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Brebes sudah cukup memberikan informasi kepada masyarakat, sebanyak 53 responden menjawab sudah sedangkan sisanya sebanyak 17 responden menjawab belum. Dari hasil jawaban pertanyaan ini, sebaiknya KPUD Kabupaten Brebes mereview serta merancang lagi bentuk sosialisasi yang akan dilakukan di Pemilu maupun Pilkada selanjutnya. Kemudian hasil jawaban dari pertanyaan terkait publik figur yang dimintai pendapat mengenai permasalahan politik dalam Pilkada, sebanyak 8 responden menjawab perangkat desa, 10 responden menjawab ketua RW/RT, 5 responden menjawab pengurus partai, 9 responden menjawab guru, 7 responden menjawab

mahasiswa, 11 responden menjawab tokoh agama, 2 responden menjawab Polri/TNI, sedangkan 18 responden menjawab tidak ada. Ini memberikan gambaran bahwa warga antusias menghadapi Pemilu / Pilkada.

Menjawab rumusan masalah penyebab masyarakat Kecamatan Songgom tidak berpartisipasi di Pilkada serentak 2017 Kabupaten Brebes. Dari pertanyaan mengenai jangkauan tempat pemungutan suara (TPS), sebanyak 68 responden menjawab mudah/TPS dekat dengan rumah, sedangkan 2 responden menjawab susah/TPS jauh dari rumah. Jadi untuk TPS tidak ada masalah, hampir semua responden dapat menjangkau TPS yang telah disediakan oleh KPUD Kabupaten Brebes. Selanjutnya dari pertanyaan mengenai partisipasi responden (nyoblos/tidak), sebanyak 56 responden menjawab ya sedangkan 14 responden menjawab tidak alias golput. Untuk 56 responden yang menjawab nyoblos pada saat Pilkada, mereka semua rata-rata mengatakan bahwa warga Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan Songgom yang pada saat pencoblosan dapat dipastikan hadir di TPS untuk memilih pilihan mereka, apalagi ada kader dari salah satu partai politik besar yang maju pada Pemilu maupun Pilkada. Hal ini dikarenakan Kabupaten Brebes merupakan basis dari partai politik tersebut. Sedangkan responden yang menjawab tidak nyoblos alias golput, tim peneliti secara kebetulan mendapati mereka yang pada saat pencoblosan / Pilkada sedang di perantauan baik diluar kota maupun diluar negeri (TKI) mengatakan bahwa hal ini sudah terbiasa terjadi di Kabupaten Brebes. Mereka juga mengatakan alasan serta argumentasinya bahwa jikalau mereka harus pulang hanya untuk mencoblos, mereka memperhitungkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Mereka sebenarnya paham betul akan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu mereka ingin diberi solusi yang terbaik. Kemudian hasil jawaban dari pertanyaan mengenai alasan tidak nyoblos alias golput, sebanyak 7 responden menjawab sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, 2 responden menjawab TPS jauh, dan 5 responden menjawab pada saat Pilkada masih diperantauan (luar kota/luar negeri). Hal ini diperkuat oleh Ketua KPUD Kabupaten Brebes, Muamar Riza pahlevi, mengatakan salah satu faktor rendahnya

partisipasi pemilih yaitu banyaknya perantau yang tidak pulang kampung saat hari pencoblosan.

Menjawab rumusan masalah yang terakhir yaitu harapan masyarakat untuk Pemilu atau Pilkada selanjutnya supaya sukses dan lancar. Sebanyak 20 responden menjawab tidak tahu, 27 responden menjawab sosialisasi, mereka berharap KPUD Kabupaten Brebes lebih meningkatkan sosialisasi yang tepat sasaran, hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Brebes khususnya dalam hal ini Kecamatan Songgom sangat luas. Dan 23 responden menjawab buat terobosan / solusi baru. Responden ini menginginkan terobosan / solusi baru guna mengatasi permasalahan warga yang merantau baik diluar kota maupun diluar negeri (TKI).

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahapan berikutnya terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Mengembangkan penelitian ini dengan memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.
2. Melakukan program pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Brebes merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi. Dukungan masyarakat dalam Pilkada merupakan sejatinya demokrasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam Pilkada, maka tidak akan ada demokrasi apalagi pemerintahan yang demokratis. Pilkada merupakan bentuk partisipasi dalam pemilu yang paling elementar. Meski demikian, indikator tinggi rendahnya partisipasi politik ditentukan oleh seberapa banyak warga masyarakat ke tempat pemungutan suara (TPS).

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Brebes terutama di Kecamatan Songgom secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dalam memberikan partisipasi politiknya.
2. Angka golput di Kecamatan Songgom masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 54,4%. Alasan terbesar masyarakat Kecamatan Songgom yang mengambil sikap golput antara lain adalah sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, dan pada saat Pilkada banyak pemilih masih diperantauan (luar kota/luar negri).

7.2. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih serius lagi dalam pendataan warganya yang menjadi TKI serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka bisa ikut aktif dalam

partisipasi politik baik dalam proses pemberian suara, mengikuti kampanye, dan hal-hal lainnya.

2. Untuk KPUD Kabupaten Brebes walaupun sudah baik akan tetapi harus bisa menjadi lebih baik lagi dalam Pemilihan Umum berikutnya, kepada KPU juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar supaya bisa mengadakan sosialisasi di setiap desa yang ada dengan cara mengundang masyarakat di suatu tempat untuk diadakan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahami cara-cara terutama bagi yang mempunyai anggota keluarga yang merantau baik luar kota maupun luar negeri yang baik dalam memberikan suara dan pada saat Pemilihan umum masyarakat tidak akan lupa untuk memberikan partisipasi politiknya dalam pemberian suara.
3. Dikarenakan akar permasalahan yang menyebabkan angka golput tinggi yaitu banyaknya warga yang merantau dan ini merupakan masalah klasik, maka hal ini harus dipecahkan masalahnya oleh KPUD Kabupaten Brebes agar warga yang merantau secara sukarela meluangkan waktunya untuk mencoblos pada saat dilaksanakannya Pemilu maupun Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Asfar. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Pustaka Eureka.
- Ramlan Surbakti. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas.
- Data KPUD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN

Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

No.	Nama	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1	Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si	FISIP UPS Tegal	Ilmu Pemerintahan	4 jam/minggu	Membuat pokok penelitian, membuat analisis penelitian
2	Diryo Suparto, M.Si	FISIP UPS Tegal	Ilmu Politik	4 jam/minggu	Membantu merumuskan hasil penelitian
3	Sarwo Edy, M.I.Kom	FISIP UPS Tegal	Ilmu Sosial	4 jam/minggu	Membantu merumuskan hasil penelitian, pengambilan data lapangan

Kuesioner Penelitian

Partisipasi Masyarakat Kec. Songgom dalam Pilkada Kab. Brebes 2017

Nama :
Jenis Kelamin : L / P
Usia : tahun
Desa :

1. Apa pendidikan terakhir anda ?

- | | | |
|------------------|--------|-------|
| a. Tidak sekolah | d. SMA | g. S2 |
| b. SD | e. D3 | h. S3 |
| c. SMP | f. S1 | |

2. Apa kegiatan utama / pekerjaan anda ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Petani / buruh tani | g. Wiraswasta |
| b. Karyawan | h. PNS/ TNI/POLRI/Pegawai
kelurahan |
| c. TKI / merantau | i. Pelajar/mahasiswa |
| d. Guru | j. Seniman |
| e. Dokter / bidan / perawat
tangga | k. Tidak bekerja / ibu rumah
tangga |
| f. Pensiunan | |

3. Apakah anda tahu bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 dilaksanakan Pilkada di Kab. Brebes ?

- | | |
|---------|---------------|
| a. Tahu | b. Tidak tahu |
|---------|---------------|

4. Apakah anda mengerti / memahami arti dan makna partisipasi politik ?

- | | |
|-------|----------|
| a. Ya | b. Tidak |
|-------|----------|

5. Menurut Anda, apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Brebes sudah cukup memberikan informasi kepada masyarakat ?

- | | |
|----------|----------|
| a. Sudah | b. Belum |
|----------|----------|

6. Kepada siapakah Anda biasanya meminta pendapat mengenai permasalahan politik dalam Pilkada ?
- | | |
|----------------------|-------------------|
| a. Perangkat desa | f. Tokoh agama |
| b. Ketua RW / RT | g. Pengusaha |
| c. Pengurus partai | h. Polri / TNI |
| d. Guru / dosen | i. LSM / Wartawan |
| e. Mahasiswa/pelajar | j. Tidak ada |
7. Apakah anda merasa mudah atau susah dalam menggunakan hak pilihnya ?
- Mudah, TPS dekat dengan rumah
 - Susah, TPS jauh dari rumah
8. Apakah anda ikut memilih (nyoblos) pada Pilkada Kab.Brebes 2017 kemarin ?
- Ya
 - Tidak
9. Jika tidak ikut memilih (tidak nyoblos alias golput), apa alasan anda ?
- Tidak terdaftar sebagai pemilih
 - Tidak mempunyai KTP Kab. Brebes
 - Sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan/harus bekerja
 - TPS jauh dari rumah
 - Pada saat pilkada masih diperantauan (luar kota/luar negeri)
 - Tidak ada pasangan calon favorit
 - Tidak tahu / tidak jawab
10. Apa yang anda harapkan agar Pemilu maupun Pilkada selanjutnya yang dilaksanakan di Kab. Brebes sukses dan lancar ?
- Tidak tahu
 - Sosialisasi lebih ditingkatkan
 - Membuat terobosan/solusi baru

TERIMA KASIH

Rekapitulasi hasil jawaban kesioner

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Nomor 1	7	22	23	13	3	2	0	0			
2	Nomor 2	15	15	5	2	3	3	7	0	5	2	13
3	Nomor 3	70	0									
4	Nomor 4	41	29									
5	Nomor 5	53	17									
6	Nomor 6	8	10	5	9	7	11	0	2	0	18	
7	Nomor 7	68	2									
8	Nomor 8	56	14									
9	Nomor 9	0	0	7	2	5	0	0				
10	Nomor 10	20	27	23								